

**KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA
DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
PEGAJAHAN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

CHINTIA PRAMAI SHELLA

NPM. 1603100070

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **CHINTIA PRAMAI SHELLA**

N P M : 1603100070

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020

W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PENGUJI II : **Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si**

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


Drs. ZULFAHMI, M.LKom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **CHINTIA PRAMAI SHELLA**
N.P.M : 1603100070
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAT DI DESA PEGAJAHAN SERDANG BEDAGAI**


Medan, 09 Maret 2020

Dosen Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Disetujui Oleh,

Dr. ARIEF SALEH, S.Sos, MSP



PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, CHINTIA PRAMAI SHELLA, NPM 1603100070, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2020

Yang menyatakan,


CHINTIA PRAMAI SHELLA



Zaghuul Cardas az Temperasy

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Slc-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : CHINTIA PRAMAI SHELLA
NPM : 1603100070
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEGAJAHAN, SERDANG BEDAGAI.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/12-2019	Perbaiki Latar Belakang, kerangka konsep, Kategorisasi dan Sistematika Penulisan.	
2.	4/01-2020	Perbaiki Latar Belakang, kerangka konsep, kategorisasi dan menambahkan uraian Teoritis.	
3.	8/01-2020	Acc Seminar Proposal skripsi.	
4.	31/01-2020	Perbaikan Draft Pedoman Wawancara.	
5.	03/02-2020	Acc Draft Pedoman Wawancara	
6.	20/02-2020	Perbaikan Hasil Wawancara	
7.	28/02-2020	Perbaikan Pembahasan Hasil wawancara dan kesimpulan keseluruhan Hasil wawancara.	
8.	29/02-2020	Perbaikan Simpulan dan Saran	
9.	02/03-2020	Acc Sidang skripsi	

Medan, 02 Maret 2020...

Dekan

(Dr. ARIFIN SAIFAN, S.Sos, M.Si)

Ketua Program Studi,

(ANWAR KHAIRIAH, S.IP, M.Pd)

Pembimbing ke : I.

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.Si)

ABSTRAK

KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEGAJAHAN SERDANG BEDAGAI

CHINTIA PRAMAI SHELLA

NPM: 1603100070

Kepemimpinan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu kewenangan Kepala Desa dalam kaitannya dengan pembagian urusan pemerintah No.38 Tahun 2007 pasal 2 ayat 3 yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa. Peran kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan lebih berdaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpin. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kepemimpinan demokratis kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Kemudian hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa narasumber untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan kepemimpinan demokratis Kepala Desa di Desa Pegajahan Serdang Bedagai melalui wawancara terbuka dengan Kepala Desa dan masyarakat. Narasumber dari penelitian sebanyak 5 orang antara lain Kepala Desa, Kepala Urusan Umum (KAUR Umum), dan 3 orang dari pihak masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai belum maksimal. Hal ini dapat dilihat, dengan kepemimpinan demokratis Kepala Desa belum mampu mengajak semua masyarakat Desa Pegajahan untuk berpartisipasi ikut serta dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan.

Kata Kunci : Kepemimpinan Demokratis, Pemberdayaan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul : **Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pegajahan Serdang Bedagai**. Salawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda **Suroto** dan Ibunda **Siti Suliasai** yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil. Yang selalu mendukung, memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju mencapai cita-cita saya.
2. Bapak **Drs. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Drs. Zulfahmi, M.I.Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Bapak **Mhd. Yamin** selaku Kepala Desa Pegajahan Serdang Bedagai.
10. Seluruh staff pegawai perangkat desa yang telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data guna untuk melengkapi skripsi penulis.
11. Untuk teman-teman seperjuangan **Yuri Agustiani, Hastuti Srimulyani Siagian,** dan **Maulina Sartika** yang sudah sama-sama saling memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman terdekat penulis **Khoirunnisa, Bella Safira, Debby Septa Yolanda** yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Medan, Maret 2020

Penulis

Chintia Pramai Shella

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Pengertian Kepemimpinan.....	10
2.1.2 Prinsip - prinsip Kepemimpinan.....	11
2.2.2 Unsur Kepemimpinan.....	13
2.2 Pengertian Kepemimpinan Demokratis.....	14
2.2.1 Ciri – ciri Kepemimpinan Demokratis	15
2.2.2 Indikator Kepemimpinan Demokratis	16
2.2.3 Dimensi Kepemimpinan Demokratis	17
2.3 Pengertian Kepala Desa.....	18

2.3.1 Menurut Undang – undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014	18
2.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.4.1 Proses Pemberdayaan Masyarakat	21
2.4.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	25
2.4.4 Teknik Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat	26
2.4.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat	27
2.4.6 Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	27
2.4.7 Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Melalui Kepemimpinan Kepala Desa	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Kerangka Konsep	31
3.3 Definisi Konsep.....	33
3.4 Kategorisasi	34
3.5 Narasumber	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	40
3.9.1 Sejarah Ringkas Desa Pegajahan	40

3.9.2 Visi dan Misi Desa Pegajahan.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	45
4.3 Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	32
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Desa Pegajahan Serdang Bedagai

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas seorang kepala desa berdasarkan Undang-Undang No.06 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 adalah bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di dalam pemerintahan desa, kepemimpinan di pegang oleh kepala desa. Salah satu model kepemimpinan yang digunakan kepala desa dalam memimpin yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu kewenangan kepala desa dalam kaitannya dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 pasal 2 ayat 3 yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa. Peran kepemimpinan demokratis kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan lebih berdaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya.

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu

dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan bergaya demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, dan menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan. Indikator kepemimpinan demokratis ada 4 (empat) yaitu keputusan dibuat bersama, menghargai potensi setiap bawahannya, mendengar kritik saran/pendapat bawahannya, melakukan kerjasama dengan bawahannya. Dalam penerapannya, gaya kepemimpinan demokratis ini terdapat koordinasi yang kuat atas pekerjaan yang diemban masing-masing bawahan sehingga kekuatan utama bukan pada pimpinan melainkan partisipasi aktif dari semua anggota. Rasa tanggung jawab internal pada masing-masing bawahan juga menjadi salah satu dasar dalam gaya kepemimpinan demokratis. Selain melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis harus bersedia mengakui keahlian para bawahan dengan bidangnya masing-masing.

Siagian (1998:44) mengatakan bahwa kepemimpinan demokratis memiliki ciri seperti selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Berarti dalam kepemimpinannya yang demokratis kepala desa lebih mendahulukan kepentingan pribadinya atau kepentingan para bawahannya. Terdapat suatu kerjasama yang efektif dan efisien dengan adanya hubungan kepentingan antara pemimpin dan bawahan

menyebabkan suatu tujuan yang terencana dengan baik, kepemimpinan yang demokratis juga dapat merubah pemikiran yang sangat kaku dalam mengambil keputusan menjadi fleksibel yang mengambil keputusan dengan cara dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota organisasi, agar tercapainya tujuan bersama.

Pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. (dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam hal ini Kehadiran kementerian desa sangat berpengaruh pada pembangunan, sesuai mandat untuk menjalankan NAWACITA yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan dan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Dalam pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari yang namanya kepemimpinan demokratis, kepemimpinan yang demokratis itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-undang Desa, tetapi modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Sebagai kementerian desa berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai

negara yang demokrasi tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan serta harus diawasi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu cara kepemimpinan yang demokratis untuk melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan ini secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan antara Pembina dan yang dibina mempunyai hubungan yang hirarki bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir dari atas ke bawah sebaliknya dalam pendampingan setara dengan yang didampingi (perangkat desa). Misi besar dalam kepemimpinan demokratis adalah memberdayakan masyarakat desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kepemimpinan yang demokratis dilakukan untuk membenteng mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat masyarakat desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong diantara pemerintah dan masyarakat.

Desa Pegajahan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pegajahan termasuk salah satu daerah yang strategis yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa Pegajahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memiliki gaya kepemimpinan demokratis.

Guna menjalankan kepemimpinan yang demokratis kepala desa pegajahan seharusnya melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang

ditujukan untuk membuat masyarakat lebih kreatif, lebih mandiri dan lebih berdaya dengan tujuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat, terutama masyarakat desa. Dari banyaknya upaya tersebut, kepemimpinan demokratis kepala desa memegang peran penting dalam kaitannya dengan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat. Termasuk kaitannya dalam usaha untuk menggali dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pegajahan. Melalui kepemimpinan demokratis diharapkan ada penekanan pada disiplin-diri dari kelompok untuk kelompok. Sehingga delegasi otoritas dalam iklim demokratis itu bukan berarti hilangnya kekuasaan pemimpin, tetapi justru memperkuat Otoritas pemimpin yang didukung oleh semua anggota, dan pemimpin bisa mengkristalisasikan pikiran serta aspirasi dari semua anggota kelompok dalam perbuatan nyata.

Pada prosesnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kepala desa sebagai pemimpin yang demokratis harus berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa serta mampu menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. Masyarakat termasuk bagian dari suksesnya pelaksanaan program desa, masyarakat mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara kepala desa dan masyarakat agar dapat terwujud pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa Pegajahan dalam melaksanakan kepemimpinan demokratis guna memberdayakan masyarakat, didukung oleh Misi besar kepemimpinan demokratis dalam memberdayakan masyarakat desa yaitu sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain adalah pemuda putus sekolah, kaum buruh, petani, dan orang miskin. Kepala Desa Pegajahan menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis dalam memberdayakan masyarakat desanya dengan menggunakan analisis pendekatan pemberdayaan 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Dimasa kini, lembaga ekonomi pedesaan yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat masih menjadi bagian yang penting dalam masyarakat desa tetapi pengaruhnya bagi masyarakat masih kurang. Pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemimpin yang memegang kepemimpinan demokratis melalui berbagai cara dan program agar tercapainya tujuan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pegajahan yaitu dengan cara memberikan pembinaan secara formal dan non-formal yang berisi penyuluhan, pelatihan serta memotivasi masyarakat di berbagai bidang kegiatan pembinaan dalam memberdayakan masyarakat. Banyak faktor yang menghambat proses program tersebut antara lain salah satunya partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri.

Kemakmuran dan keberdayaan masyarakat desa harus di dorong dengan adanya peningkatan perekonomian desa, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Misi besar dalam kepemimpinan demokratis dalam memberdayakan masyarakat desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis masih belum terlaksana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dideskripsikan masalah mengenai kepemimpinan demokratis Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Pegajahan adalah masih lemahnya cara dan program yang dilaksanakan belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat, serta masih adanya faktor yang menghambat program pembangunan desa, antara lain partisipasi dari masyarakat masih kurang akibatnya dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan mengembangkan skill yang masyarakat miliki dan juga menghambat perekonomian.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan di kaji atau di bahas dalam suatu penelitian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan di capai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan tidak mendapatkan hasil yang di harapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kapasitas kepemimpinan demokratis kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pegajahan Serdang Bedagai.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan menjadikan kemampuan kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pegajahan Serdang Bedagai dalam bidang pembangunan.
- c. Secara akademis, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang model kepemimpinan khususnya jurusan ilmu administrasi publik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari : Kepemimpinan, Kepemimpinan Demokratis, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kepemimpinan

Menurut Rivai (2014:3) kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

Menurut Terry dalam Sutarto (1991:17) kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri orang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin.

Menurut Yukl dalam Tambunan (2015:44), kepemimpinan sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Anoraga (2003:2) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain (bawahan) agar mau bekerja sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan dalam suatu kepemimpinan mencakup pemberian dorongan, motivasi, dan pengarahan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.

2.1.2 Prinsip - Prinsip Kepemimpinan

Telah banyak para ahli menjabarkan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang dapat mengarahkan seseorang untuk menjadi pemimpin efektif. Prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut sering dibahas dari pendekatan perilaku atau kepribadian pemimpin dan peran yang penting dari seorang pemimpin. Penulis mencoba menguraikan beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu:

a. Melayani

Northouse (2013:207) dalam bukunya menuliskan bahwa kepemimpinan yang melayani merupakan pendekatan yang berfokus pada kepemimpinan dari sudut pandang pemimpin dan perilakunya. Kepemimpinan yang melayani menekankan bahwa pemimpin perhatian pada masalah pengikutnya, empati serta mengembangkan mereka. Pemimpin yang melayani mengutamakan pengikut, memberdayakan, dan membantu dalam mengembangkan kapasitas pribadi secara penuh dari para pengikutnya. Pemimpin yang melayani bersifat etis, serta memimpin dengan cara

yang melayani kepentingan yang lebih besar dari organisasi, komunitas dan masyarakat secara umum.

b. Membuat Keputusan

Keberhasilan seorang pemimpin untuk menentukan kebijakan yang ingin dibuat atau ditetapkannya, diawali dengan sebuah keputusan strategis yang diambil pemimpin tersebut. Dalam menjalankan peran kepemimpinan, membuat keputusan merupakan kemampuan yang harus diupayakan pemimpin untuk dikembangkan.

c. Keteladanan

Keteladanan seorang pemimpin ditunjukkan melalui sikap dalam memberikan inspirasi, membimbing dan memotivasi para bawahan, memiliki kemampuan luas, kreatif, visioner, bekerja secara jujur, dan ikhlas, serta memiliki perhatian dan keperdulian.

d. Bertanggung Jawab

Menjadi pemimpin merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban sebagai bentuk dari amanah, dukungan atau kepercayaan orang lain yang memiliki harapan kepada seorang pemimpin tersebut untuk melakukan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

e. Bekerja Sama

Pemimpin yang efektif akan mampu menciptakan budaya kerjasama tim yang baik diantara anggota organisasi, melakukan komunikasi yang efektif dengan para bawahan, serta mmenciptakan lingkungan kerja yang baik. Dengan terciptanya kerjasama yang baik, maka seluruh pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan tepat

waktu, tujuan yang diinginkan dapat dicapai, dan para anggota organisasi akan bekerja dengan senang hati.

f. Menciptakan Perubahan

Pemimpin harus mampu membuat terobosan-terobosan baru, sehingga tercipta suatu pembaharuan fundamental baik di tubuh organisasi, produk atau jasa, maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang memiliki inovatif dan kreatifitas akan menghindari pola kerja yang bersifat rutinitas (monoton) sehingga tidak memberikan arah perkembangan yang baik bagi yang dipimpinnya. Dengan kreatifitas, pemimpin juga akan berani menciptakan peluang-peluang dan berani menghadapi tantangan-tantangan besar dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Unsur Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki beberapa unsur, yaitu adanya:

1. Pemimpin. Seseorang yang mendorong atau memengaruhi seseorang atau sekelompok orang sehingga tercipta hubungan kerja yang serasi dan menguntungkan.
2. Pengikut. Seseorang atau sekelompok orang yang mendapat dorongan atau pengaruh sehingga bersedia dan dapat melakukan berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sifat atau perilaku tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong ataupun memengaruhi seseorang atau sekelompok orang.

4. Situasi dan kondisi tertentu. Hal tersebut agar memungkinkan terlaksananya kepemimpinan.

2.2 Kepemimpinan Demokratis

Menurut Robbins dan Coulter dalam Tambunan (2015:54), pemimpin bergaya demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, dan menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan.

Menurut Thoha (2013:49), kepemimpinan demokratis adalah kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Menurut Winardi (2000:78) kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Dengan kata lain, setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat diberikannya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Selain itu dapat diketahui bagaimana melaksanakannya secara efektif dan efisien.

Menurut Indrawijaya dalam Rivai (2014: 267), kepemimpinan demokratis pada umumnya berasumsi bahwa pendapat orang banyak lebih baik dari pendapatnya sendiri dan adanya partisipasi akan menimbulkan tanggung jawab bagi

pelaksanaannya. Asumsi lain bahwa partisipasi memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengembangkan diri mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan demokratis yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan pendekatan pada rasa tanggung jawab internal dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.

2.2.1 Ciri – Ciri Kepemimpinan Demokratis

Menurut Siagian (1998:44) adapun ciri-ciri seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut:

- a) Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitiktolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia
- b) Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya
- c) Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya
- d) Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan
- e) Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian disbanding dan diperbaiki agar bawahan

itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan lain

- f) Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya
- g) Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin

2.2.2 Indikator Kepemimpinan Demokratis

Adapun indikator kepemimpinan demokratis yang telah disesuaikan dengan ciri-cirinya, antara lain sebagai berikut :

- a) Keputusan dibuat bersama

Pemimpin yang demokratis tidak sungkan untuk terlibat bersama-sama dengan bawahan untuk membuat keputusan serta melakukan aktivitas kerja demi pencapaian tujuan organisasi.

- b) Menghargai potensi setiap bawahannya

Kepemimpinan demokratis menghargai setiap potensi individu dan bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat.

- c) Mendengar kritik, saran / pendapat dari bawahan

Mendapat kritikan, saran/pendapat dari bawahan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi. Dengan demikian akan ada kecenderungan untuk lebih meningkatkan potensi diri dan bisa lebih baik dari sebelumnya serta belajar dari kesalahan yang telah dilakukan.

d) Melakukan kerjasama dengan bawahannya

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerja sama/terlibat langsung secara bersama-sama dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin juga tidak sungkan untuk terjun langsung kelapangan untuk menjalankan tugas.

2.2.3 Dimensi Kepemimpinan Demokratis

Seorang pemimpin bukanlah hanya seseorang yang dapat memimpin saja, tetapi harus memiliki kekuatan, semangat untuk mengubah sikap sehingga bawahan menjadi *conform* dengan pemimpin.

Menurut Robbins (2009:187) terdapat beberapa dimensi kepemimpinan demokratis, yaitu :

1) Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas.

2) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima atau dari pimpinan kepada bawahan dan sebaliknya dengan maksud untuk mengubah tingkah laku penerima.

3) Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan suatu aktivitas.

4) Kualitas

Kualitas adalah suatu nilai yang melekat pada seseorang.

5) Pengembangan diri

Pengembangan diri adalah pengembangan potensi diri dan kepribadian seseorang untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai.

2.3 Kepala Desa

2.3.1 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- d. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chambers dalam Mulyawan (2016:74) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*”.

Menurut Papilaya (2001:1) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan serta upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Kartasmita dalam Mulyawan (2016:75) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Mardikanto (2013:100) pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.4.1 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto dalam Huraerah (2011:102-103) pelaksanaan proses dan pencapaian pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

- a. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- b. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) Antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. **Penyokongan:** pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan Antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*.

2.4.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasmita (1996:159-160), upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat

pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan tempat ter-konsentrasinya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program yang umum yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat berdasar sifatnya. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai

program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:114-115) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, antara lain buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin.
 - b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
2. Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian adalah sebagai berikut:
 - a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama
 - b. Diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya

- c. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

2.4.4 Teknik Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut maka menurut Dubois dan Miley (1992 :211) terdapat beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

1. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan, kerjasama klien.
2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik propesi, keterlibatan pengembangan profesional, riset dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

2.4.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator pemberdayaan menurut Kiefer (2016:73) mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik dan kompetensi partisipatif begitu juga Parson, Jorgenson & Hernanzed (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk kepada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

2.4.6 Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife (1995:63) ada tiga strategi yang diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- 1) Perencanaan dan Kebijakan, untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan policy yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan.

- 2) Aksi Sosial dan Politik, diartikan agar sistem politik yang tertutup diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan.
- 3) Peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat/kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya skill untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial.

2.4.7 Pemberdayaan Masyarakat yang di Lakukan Melalui Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas pokok dan fungsi kepala desa berdasarkan Undang-Undang No.06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam pemerintahan desa, kepemimpinan di pegang oleh kepala desa. Salah satu model kepemimpinan yang digunakan kepala desa dalam memimpin yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu kewenangan kepala desa dalam kaitannya dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 pasal 2 ayat 3 yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Untuk penerapan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang maksimal, maka dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan akan jauh lebih berhasil ketika Kepala Desa mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, sesuai dengan situasi yang ada di Desa, seperti kondisi masyarakat, situasi masyarakat, situasi lingkungan dan kondisi perangkat desa yang ada di desa tersebut.

Kepemimpinan yang demokratis dalam pengambilan keputusan selalu dengan cara musyawarah kepada pihak yang terkait. Kepala desa sebagai pemimpin dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan program pembinaan kepada masyarakat secara formal dan non formal. Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di desa tidak dengan memberikan uang kepada masyarakat, tetapi dengan memberikan ilmu atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang ingin diberdayakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan metodologi penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Menurut Arikunto (2010:03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang di maksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu untuk menganalisanya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitan pada saat sekarang berdasarkan fakta fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moleong (2012:05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan,

perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realita yang sebenarnya.

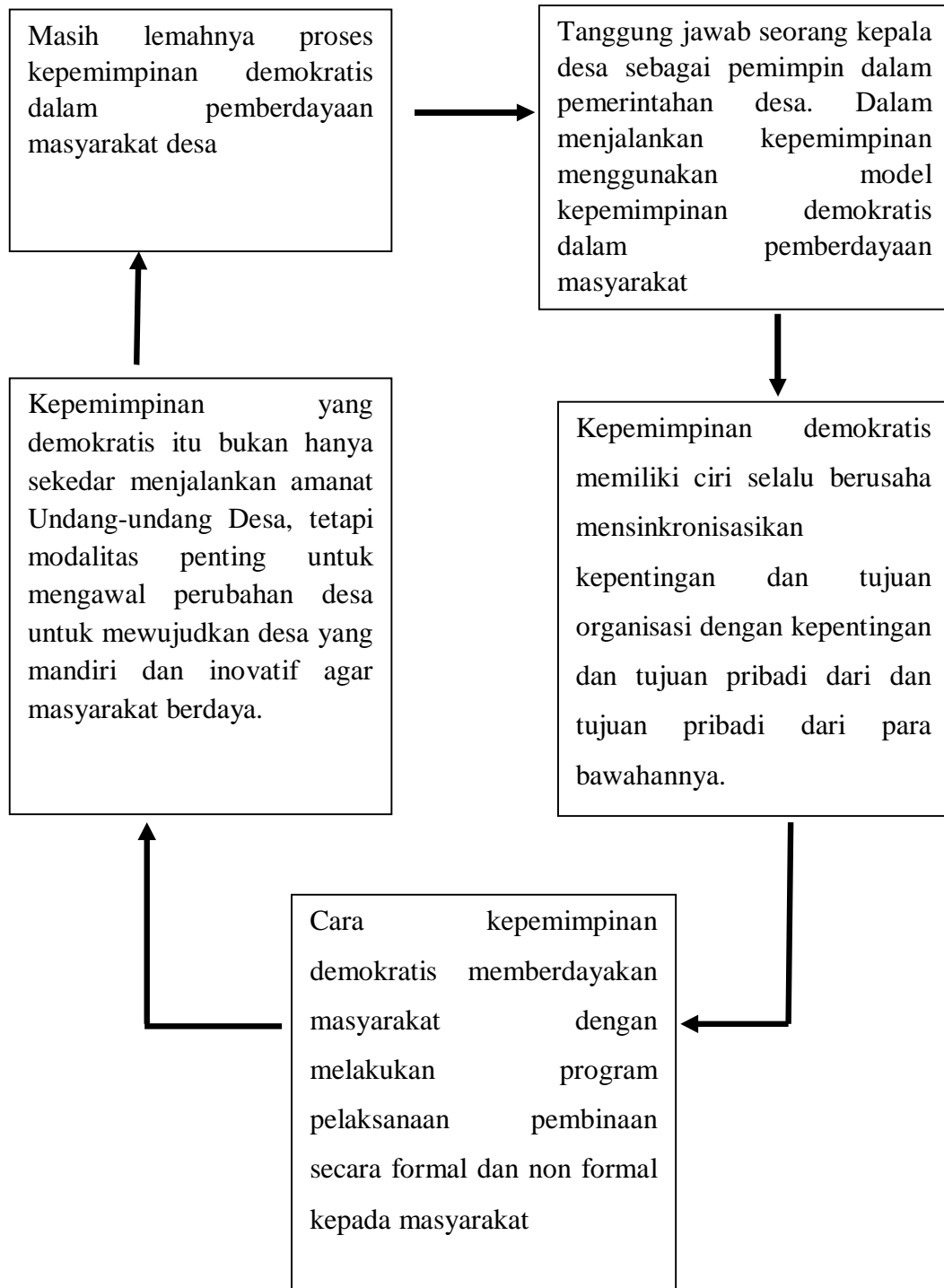
Peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat menyeluruh dan dinamis, dan dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam. Sedangkan dalam metode deskriptif, peneliti tidak hanya terfokus dalam pengumpulan data saja tetapi juga melakukan analisa dan terinterpretasi dari data itu sendiri, dan juga cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan keterkaitan.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep dalam hal ini adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Agar supaya konsep tersebut dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi variabel-variabel. Adapun Kerangka Konsep dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai suatu ciri yang sama. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. kepemimpinan yaitu kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat – sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Berhasil atau gagalnya suatu organisasi, ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang dipimpinnya.
- b. Kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan demokratis yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal dan kerja sama yang baik.

Kekuatan kepemimpinan demokratis terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.

- c. Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.
- d. pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya kerjasama dengan bawahannya
- b. Adanya ciri kepemimpinan demokratis yang selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya

- c. Adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemimpin dalam memberdayakan masyarakat
- d. Adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kepemimpinan kepala desa

3.5 Narasumber

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan untuk narasumber adalah informan. Sebagai salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai persoalan penelitian ini. Dalam penelitian ini informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang, antara lain:

1) Dua orang dari pihak Pemerintahan Desa :

a. Narasumber 1

Nama : Mhd. Yamin

Usia : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan terakhir : SLTA/SMA

b. Narasumber 2

Nama : Siti Endang Purnamasari Amd.Ak
Usia : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Urusan Umum
Pendidikan terakhir : D3

2) Tiga orang dari pihak masyarakat :

c. Narasumber 3

Nama : Andi
Usia : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat
Pendidikan terakhir : SMA

d. Narasumber 4

Nama : Rizal
Usia : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat
Pendidikan terakhir : SMA

e. Narasumber 5

Nama : Krismanto
Usia : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat
Pendidikan terakhir : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui:

1) Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

2) Observasi

Teknik observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap terhadap fenomena-fenomena yang menjadi objek penelitian dan mencatat segala gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, dan untuk membantu mengerti perilaku masyarakat.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian sebagai sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer. Adapun teknik pengumpulan data sekunder antara lain:

a) Dokumentasi

Teknik ini diperoleh menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dalam lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.

b) Studi Kepustakaan

Teknik ini mengumpulkan data melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dan akhir sebuah tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola- pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu

juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020. Sesuai dengan judul penelitian Kapasitas kepemimpinan demokratis kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pegajahan Serdang Bedagai, maka penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Ringkas Desa Pegajahan

Desa Pegajahan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pegajahan termasuk salah satu daerah yang strategis yang merupakan daerah perkembangan kecamatan. Nama pegajahan merupakan penamaan konstektual yang berasal dari Bahasa Simalungun yaitu Pargajahan, yang artinya tempat gajah. Dimana mereka pertama kali menemukan beberapa ekor gajah liar di desa ini, itulah yang melatarbelakangi mereka (etnik Simalungun) menamakan desa tersebut sebagai Desa Pargajahan. Seiring waktu berjalan nama Pargajahan mengalami perubahan penyebutan menjadi Pergajahan hingga tahun 1974. Nama desa ini berubah kembali penyebutannya menjadi Pegajahan dikarenakan semakin banyaknya etnik pendatang

(di luar etnik Simalungun) yang menyebutkan desa Pergajahan dengan berbagai macam bahasa dan penyebutannya yang akhirnya nama desa tersebut dikenal dengan Desa Pegajahan.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Pegajahan secara umum berupa dataran rendah yang berada pada ketinggian ≤ 50 Mdl diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 32° C. Orbitas dan waktu tempuh dari pusat pemerintah kecamatan 1,2 Km, jarak dari ibukota Kabupaten 34 Km dan jarak dari Ibukota Provinsi 54 Km.

Letak pedesaan jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Namun banyak juga pekerjaan sampingan yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kehidupan masyarakat desa sangat ketergantungan pada alamnya serta struktur perekonomian penduduk bersifat agraris.

Mengenai jumlah penduduk Desa Pegajahan yang mempunyai luas sekitar 798 Ha yang didapat dari data desa pada tahun 2019 dengan keseluruhan penduduk 4140 jiwa dan terdiri dari 1154 kepala keluarga (KK). Dilihat dari peta Kecamatan Pegajahan, Desa Pegajahan termasuk salah satu daerah yang strategis yang merupakan daerah perkembangan kecamatan.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Desa Pegajahan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, terbagi atas 6 (enam) dusun yaitu : Dusun Perjuangan,

Dusun Harapan I, Dusun Harapan II, Dusun Sri Asih, Dusun Karang Sari, Dusun Pelita.

Adapun batas wilayah Desa Pegajahan yang dijabarkan di bawah ini :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lestari Dadi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukasari
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bingkat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan PTP II dan Desa Bingkat

3.9.2 Visi dan Misi Desa Pegajahan

a. Visi

Adapun visi dari Desa Pegajahan yaitu :

“Terwujudnya peningkatan sarana infrastruktur dan pelayanan publik yang unggul, inovatif dan berkelanjutan”.

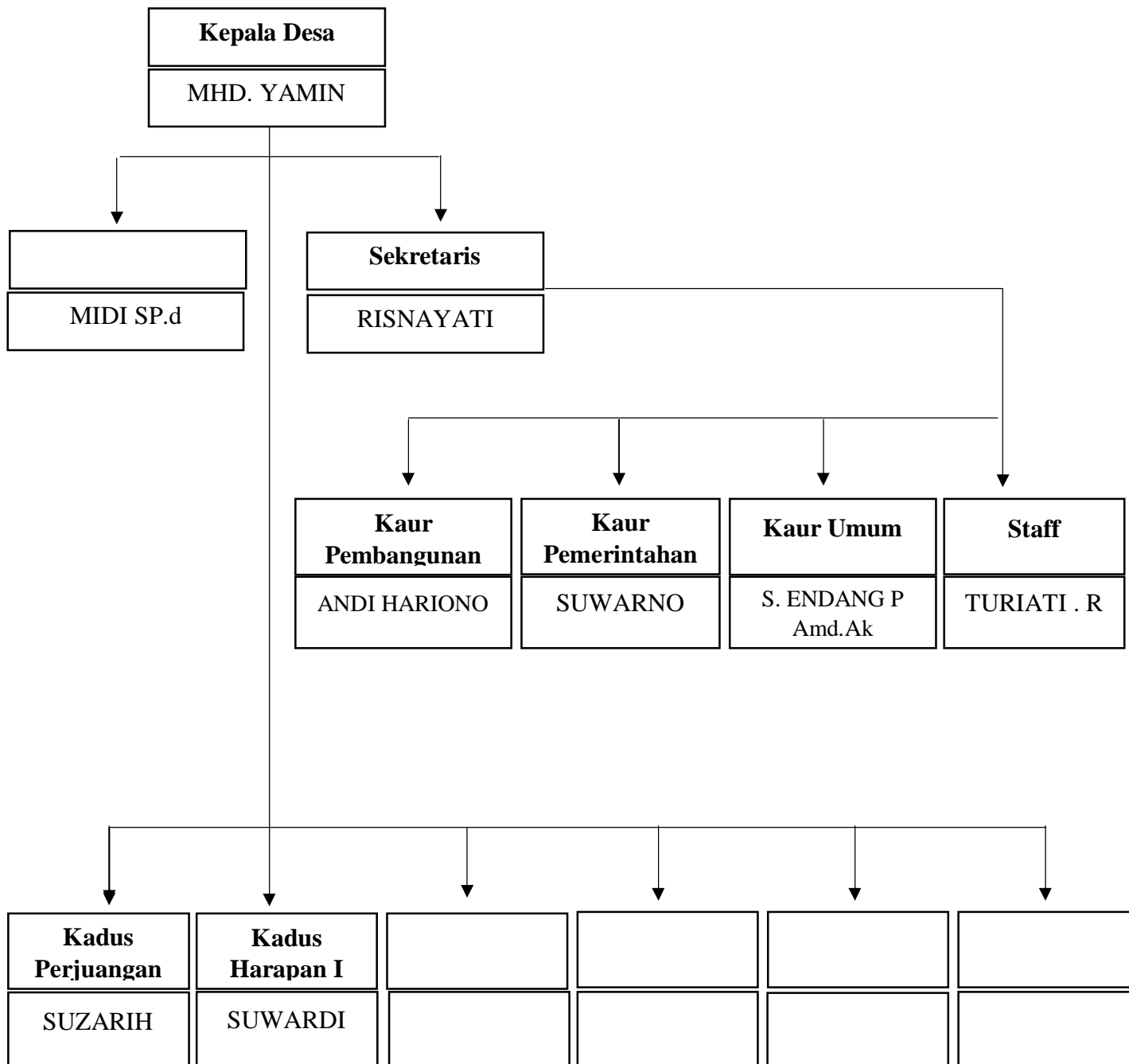
b. Misi

Dalam meraih Visi Desa Pegajahan seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pegajahan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Sarana Desa, Pendidikan dan Pertanian
2. Menjalinkan Kerja Sama Dengan Lintas Sektoral
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Dapat di Pertanggung Jawabkan

3.9.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pegajahan

Gambar 3.2



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada kemampuan kepala desa yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis dalam pemberdayaan masyarakat. Penulis menentukan bahwa yang menjadi narasumber berjumlah 5 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Wawancara dilaksanakan di Kantor Desa Pegajahan Serdang Bedagai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan Pemerintahan Desa maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya Kerjasama Dengan Bawahannya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan Bapak Mhd. Yamin selaku Kepala Desa Pegajahan mengatakan dalam menjalankan tugas Kepala Desa sebagai pemimpin yang demokratis yang selalu bekerjasama dan juga dalam mengambil keputusan selalu dengan musyawarah, Kepala Desa tidak pernah bekerja sendiri, sudah melibatkan para perangkat desa yang telah berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan bidangnya sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah. Adapun cara Kepala Desa melibatkan bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan, permasalahan apapun yang terjadi tidak langsung Kepala Desa yang menangani tetapi perangkat desa yaitu kepala dusun terlebih dahulu, setelah itu kepala dusun melaporkan kepada kepala desa, lalu dimusyawarkan apa permasalahan yang telah di dusun tersebut.

Yang menjadi hambatan dalam kerjasama yang dilakukan Kepala Desa dengan bawahannya ialah partisipasi masyarakat. Kepala Desa mengatakan, kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Pegajahan, maka kerjasama yang sudah dilakukan dengan bawahan belum maksimal berjalan dengan baik.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan ibu Siti Endang Purnamasari Amd,Ak selaku KAUR Umum (Kepala Urusan Umum) beliau mengatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya Kepala Desa sudah melibatkan perangkat desa terutama kepala dusun, dengan hal itu

terlihat terjadinya kerjasama antara pemimpin dengan bawahannya. Kepala desa melibatkan langsung perangkat desa yang bidangnya terkait dalam memberdayakan masyarakat. Dalam menanganinya Kepala Desa tidak pernah dengan sendirinya, seperti dalam memberdayakan masyarakat Kepala Desa membentuk tim untuk mengadakan pembinaan penyuluhan kepada masyarakat. Tetapi, sebagian masyarakat Desa Pegajahan masih sulit untuk menghadiri dan mengikuti penyuluhan yang dilakukan Kepala Desa dan bawahannya dalam membina masyarakat untuk berdaya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan bapak Andi selaku Masyarakat Desa Pegajahan beliau mengatakan bahwa dalam bekerjasama Kepala Desa sudah melakukannya dengan baik, sudah melibatkan perangkat desa terutama kepala dusun, kepala dusun selalu mendata pemuda-pemudi masyarakat yang kira-kira kehidupannya perlu diberdayakan. Kepala Desa melibatkan bawahan dengan memerintahkan langsung perangkat desa yang terkait akan memberdayakan masyarakat. Dengan kerjasama yang dilakukan, pemuda pemudi masyarakat belum maksimal sudah dikatakan berdaya, beliau menambahkan bahwa masyarakat setempat selalu berpikir diberdayakan itu hanya dengan uang. Kerjasama yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik hanya saja ada hambatan dan kendala seperti kurangnya sebagian kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat.

Dari jawaban narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pemimpin dengan bawahannya/perangkat desa sudah bekerjasama terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Kepala Desa yang sudah menunjuk

langsung perangkat desa yang bidangnya terkait dalam memberdayakan masyarakat, dan bawahan sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang sudah ditetapkan.

4.2.2 Adanya Ciri Kepemimpinan Demokratis Yang Selalu Berusaha Mensinkronisasikan Kepentingan dan Tujuan Organisasi dengan Kepentingan dan Tujuan Pribadi dari Para Bawahannya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan bapak Mhd. Yamin selaku Kepala Desa Pegajahan mengatakan bahwa sebagai pemimpin yang demokratis beliau berupaya mendekatkan diri dan berinteraksi kepada masyarakat, berupaya mewujudkan kepentingan masyarakat dan tidak selalu mengupayakan terlebih dahulu kepentingan dan tujuan pribadinya. Tujuan yang akan dicapai dengan kepemimpinannya ialah memberdayakan masyarakat. Beliau mengatakan, sebagai pemimpin sudah berperan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan, tetapi masih belum aktif karena hanya membuat suatu program saja tidak mengatasinya secara langsung kepada masyarakat melainkan dengan melibatkan bawahan. Dalam mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar berdaya, Kepala Desa mengakomodir melalui keterlibatan perangkat desa/bawahan termasuk kepala dusun, kepala dusun menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat setempat kemudian kepala dusun memberikan laporan kepada Kepala Desa. Kepala Desa beserta perangkat desa mengadakan rapat guna memusyawarahkan keputusan yang akan dilakukan untuk mewujudkan kebutuhan dari para masyarakat.

Menurut Kepala Desa ada terdapat faktor penghambat, seperti adanya sebagian masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Kepala Desa dan perangkat desa/bawahan. Kepala Desa mengatakan, masyarakat ingin kebutuhannya dipenuhi agar berdaya, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang sulit diajak bekerjasama guna sama-sama memberdayakan kehidupan masyarakat setempat.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan ibu Siti Endang Purnamasari Amd.Ak selaku KAUR Umum (Kepala Urusan Umum) beliau mengatakan bahwa dalam mewujudkan kepentingan dan tujuan para bawahan, Kepala Desa juga tidak selalu terfokus untuk mendahulukan kepentingan pribadinya. Tujuan yang akan dicapai dengan kepemimpinannya yang demokratis ialah memberdayakan masyarakat. Kepala Desa sudah ikut berperan dalam pembuatan program yang akan dijalankan guna untuk memberdayakan masyarakat Desa Pegajahan, tetapi program tersebut dilaksanakan/dijalankan dengan melibatkan perangkat desa/bawahan. Kepala Desa dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat melibatkan para bawahan untuk mendata kebutuhan apa yang perlu diberi agar tercapai tujuan dalam memberdayakan masyarakat. Setelah diketahui, Kepala Desa beserta perangkat desa mengadakan rapat di Kantor Desa guna membicarakan/memusyawarahkan keputusan apa yang akan dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Beliau mengatakan, hingga saat ini factor penghambat dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat ialah timbul dari masyarakat itu sendiri. Kemauan masyarakat ingin kebutuhannya terpenuhi dan diwujudkan, tetapi partisipasi masyarakat masih kurang.

Sedangkan, Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan bapak Krismanto selaku masyarakat Desa Pegajahan beliau mengatakan bahwa dalam mewujudkan kepentingan dan tujuan, Kepala Desa juga masih kurang beinteraksi kepada masyarakat. Kepala Desa berperan dalam hal memberdayakan masyarakat dengan membuat program pembinaan yang dilakukan dengan melibatkan bawahannya. Beliau mengatakan, sebagian masyarakat merasa Kepala Desa sebagai pemimpin yang dikatakatan demokratis juga masih belum sepenuhnya mewujudkan kebutuhan masyarakat agar berdaya. Permasalahan yang masyarakat rasakan, Kepala Desa beserta perangkat desa memusyawarahkan terlebih dahulu tanpa mengikutsertakan masyarakat.

Terdapat faktor penghambat yang ditemukan Kepala Desa dalam mewujudkan kepentingan masyarakat kemungkinan ditemukan dari sebagian masyarakat masih ada yang kurang partisipasi, sehingga program yang dijalankan masih kurang maksimal dan menyebabkan masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan ditangani Kepala Desa.

Dari jawaban narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam mensinkronisasikan dan mewujudkan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai masih dikatakan belum berjalan dengan maksimal, meskipun Kepala Desa

tidak selalu mewujudkan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Dengan pencapaian tujuan yang belum maksimal, dapat dilihat dari sebagian masyarakat Desa Pegajahan yang belum merasakan adanya kebutuhan yang telah diakomodir oleh Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Hal ini sebenarnya juga terdapat kesalahan dari masyarakat itu sendiri. Karena sebagian masyarakat masih ada yang tidak ikut berpartisipasi akan hal pemberdayaan yang dilakukan.

4.2.3 Adanya Tanggung Jawab Yang Dimiliki oleh Pemimpin Dalam Memberdayakan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan bapak Mhd. Yamin selaku Kepala Desa Pegajahan, sebagai Kepala Desa dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberdayakan masyarakat beliau melakukan pembinaan dengan mekanisme dan anggaran yang didapat dari dana Desa. Pembinaan tersebut ada dua jenis yaitu secara formal dan non-formal, untuk pembinaan yang secara non-formal itu berbentuk seperti pemberian penyuluhan kepada masyarakat setempat yang disampaikan melalui kepala dusun. Kepala dusun ditugaskan oleh Kepala Desa untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat seperti di perwiritan dengan cara yang non-formal hanya memberi arahan-arahan dan menyampaikan hasil yang ada dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dan para bawahannya. Beliau mengatakan, ada pemberian pembinaan secara formal kepada masyarakat dengan menggunakan aturan-aturan

yang sudah ditetapkan seperti Kepala Desa membuat pelatihan dan penyuluhan dengan diadakannya kegiatan di desa. Pelatihan yang dijalankan ialah ditujukan kepada pemuda setempat yang putus sekolah untuk mengembangkan skill dalam pelatihan kecantikan (salon). Dengan diadakannya pembinaan secara formal terlihat bahwa Kepala Desa sudah menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin untuk memberdayakan masyarakat. Kepala Desa melibatkan bawahan dalam kegiatan pembinaan kepada masyarakat yang secara formal, menempatkan bawahan untuk menjadi panitia dalam acara pelatihan-pelatihan yang diadakan.

Kemudian beliau menambahkan, untuk di Desa Pegajahan target utama pembinaan untuk kegiatan memberdayakan masyarakat itu ditujukan kepada pemuda pemudi Desa Pegajahan, membuat pembinaan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemuda untuk pencegahan NARKOBA. Namun, tidak Kepala Desa yang melakukan pembinaan tersebut. Kepala Desa hanya membuat program pembinaan yang akan dijalankan dan membentuk tim untuk mengadakan pembinaan tersebut. Untuk kegiatan pembinaan yang secara formal dilaksanakan, Kepala Desa membuat kegiatan dengan menggunakan dana desa yang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan bawahan.

Beliau mengatakan, sudah berupaya bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk memberdayakan pemuda/pemudi masyarakat Desa Pegajahan, tetapi masih kurang maksimal dengan diadakan program pembinaan tersebut. Karena, masih banyak pemuda masyarakat yang masih tetap membuat kesalahan itu padahal sudah sering dikumpulkan diberi suatu pembinaan. Artinya,

masih kurang partisipasi pemuda setempat atas kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Hingga saat ini Kepala Desa belum mampu mengatasi persoalan permasalahan menyadarkan pemuda masyarakat Desa Pegajahan untuk menjauhi NARKOBA.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan bapak Rizal dan bapak Krismanto selaku masyarakat Desa Pegajahan, beliau mengatakan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberdayakan masyarakat Kepala Desa membuat program pembinaan yang dijalankan secara formal dan non-formal melalui tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk memberikan pembinaan dengan penyampaian berupa sosialisasi di masyarakat terutama kepada pemuda setempat. Untuk pembinaan penyampaian sosialisasi secara non-formal Kepala Desa menugaskan kepala dusun untuk mensosialisasikannya di dusun masing-masing. Keterlibatan kepala dusun beserta tim yang terkait akan hal pembinaan dalam memberdayakan masyarakat Desa Pegajahan bertujuan untuk mengembangkan dan mengubah kehidupan masyarakat setempat. Untuk kegiatan pembinaan yang berbentuk formal, Kepala Desa juga membentuk pelatihan kecantikan (salon) untuk pemudi yang putus sekolah, guna untuk mengembangkan skill yang dimiliki agar kedepannya kehidupannya bisa lebih berdaya.

Beliau mengatakan, untuk permasalahan yang sedang marak di Desa Pegajahan adalah banyaknya pemuda setempat yang memakai NARKOBA, maka dari itu target utama pembinaan dalam hal memberdayakan masyarakat yang dituju ialah pemuda masyarakat setempat agar mencegah dirinya sendiri untuk tidak

memakai NARKOBA. Kepala Desa membentuk tim untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan penggunaan NARKOBA. Kegiatan tersebut dilakukan dengan kegiatan yang formal, dimana dengan menggunakan dana desa yang sudah di anggarkan dalam kegiatan tersebut.

Beliau mengatakan, dengan dilaksanakannya pemberdayaan dengan cara memberikan pembinaan masih sedikit perubahan yang terlihat di Desa Pegajahan ini. Hal ini dikarenakan, masih kurangnya tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemimpin yang demokratis untuk turun langsung menghadapi keadaan masyarakat di Desa berbicara dan memberikan pembinaan langsung kepada masyarakat, hanya dengan melibatkan para bawahannya saja. Sehingga sebagian masyarakat juga masih tidak menganggap penting atas pembinaan yang sudah dilakukan selama ini.

Dari jawaban narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin yang demokratis tanggung jawab yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam menjalankan program pembinaan untuk memberdayakan masyarakat Kepala Desa tidak sepenuhnya turun langsung menghadapi masyarakat untuk memberikan pembinaan. Kepala Desa selalu melibatkan para bawahannya, sehingga masyarakat Desa Pegajahan beranggapan bahwa tidak ada tanggung jawab yang maksimal sebagai pemimpin di Desa dalam mengatasi permasalahan yang ada.

4.2.4 Adanya Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Melalui Kepemimpinan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan bapak Mhd. Yamin selaku Kepala Desa Pegajahan, beliau mengatakan bahwa sebagai pemimpin yang menjalankan tugas sesuai Undang-undang yang telah ditetapkan, yang salah satu tugas Kepala Desa memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa sudah berperan dalam memberdayakan masyarakat, peranan yang dilakukan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dengan membuat program pembinaan secara formal dan non-formal. Kepala Desa mengadakan program pembinaan yang secara formal berbentuk pelatihan yang ditujukan kepada pemuda yang putus sekolah. Pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan kecantikan (salon). Kegiatan pembinaan yang formal juga dilakukan dalam bentuk penyuluhan untuk pemuda masyarakat Desa Pegajahan dengan memberikan pembinaan berupa penyuluhan agar mencegah penggunaan NARKOBA, kegiatan ini dilakukan langsung oleh tim Satgas NARKOBA yang sudah dibentuk untuk menangani segala permasalahan NARKOBA di Desa Pegajahan. Program pembinaan yang secara formal diadakan dengan menggunakan biaya pengeluaran yang di ambil dari dana desa yang sudah dianggarkan khusus untuk melaksanakan pembinaan tersebut. Sedangkan, program kegiatan pembinaan yang non-formal berbentuk arahan dan sosialisasi yang bisa kapan saja disampaikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh perangkat desa/kepala dusun.

Beliau mengatakan, sebagai pemimpin di Desa sangat banyak hambatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Di Desa Pegajahan, hambatan yang terdapat dalam memberdayakan masyarakat ialah kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat setempat. Dalam menjalankan kepemimpinan, Kepala Desa dalam membuat keputusan selalu dengan musyawarah oleh para bawahannya. Kepala Desa sudah berkoordinasi dengan para bawahannya dalam menjalankan tugasnya memberdayakan masyarakat.

Beliau menambahkan, dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan baik itu pemberdayaan yang berbentuk pembinaan secara formal maupun non-formal, terdapat dampak yang dirasakan masyarakat baik yang positif maupun yang negatif.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dengan ibu Siti Endang Purnamasari Amd.Ak selaku KAUR Umum (Kepala Urusan Umum) beliau mengatakan Kepala Desa sudah berperan di Desa dalam memberdayakan masyarakatnya, dengan cara bekerjasama dengan perangkat desa/bawahan. Dalam memberdayakan masyarakat tidak semua berjalan dengan baik begitu saja, ada terdapat hambatan. Beliau mengatakan, hambatan yang terjadi ialah masih kurangnya partisipasi sebagian masyarakat Desa Pegajahan. Dalam memberdayakan masyarakat, Kepala Desa berkoordinasi dengan bawahannya. Meskipun pemberdayaan masyarakat di tangani oleh Kepala Desa, tetapi Kepala Desa tetap melibatkan bawahan untuk menjalankan program pembinaan dalam memberdayakan masyarakat. Kepala Desa membentuk tim untuk membantunya dalam memberdayakan masyarakat, tim tersebut melaksanakan tugasnya yaitu

mengadakan pelatihan kecantikan untuk pemuda masyarakat Desa Pegajahan yang putus sekolah, dan mengadakan pembinaan seperti kegiatan penyuluhan tentang pencegahan penggunaan NARKOBA yang ditujukan pada pemuda masyarakat Desa Pegajahan.

Beliau mengatakan, dengan diadakannya program pembinaan pelatihan dan penyuluhan tersebut, maka terdapat dampak yang ditemukan dari hasil pelatihan yang sudah dilakukan, bahwa warga yang mengikuti pelatihan mendapatkan hasil atas pelatihan yang sudah diikuti.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan bapak Andi selaku masyarakat Desa Pegajahan, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan kepemimpinan Kepala Desa, Kepala Desa sudah berperan seperti dalam membuat program pembinaan untuk memberdayakan masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa/bawahan dalam menjalankan pembinaan tersebut. Pembinaan yang dilakukan berbentuk seperti pelatihan dan penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala Desa selalu melibatkan bawahan. Dalam hal pemberdayaan, dibentuk tim untuk membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat. Dengan adanya kepemimpinan Kepala Desa, segala permasalahan yang ada di Desa diselesaikan dengan mengadakan musyawarah dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dari setiap dusun.

Kepala Desa membentuk program pembinaan seperti pelatihan dan penyuluhan guna untuk menjalankan kepemimpinannya dalam memberdayakan masyarakat Desa Pegajahan. Beliau mengatakan, meskipun Kepala Desa sudah berkoordinasi dengan perangkat desa yang terkait dibidang masing-masing, masih terdapat kegagalan kerjasama atas koordinasi antara Kepala Desa dengan perangkat desa/bawahan dan masih ditemukan kurangnya tanggung jawab Kepala Desa sebagai pemimpin.

Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan, maka dapat dibuktikan dampak yang diterima masyarakat, tetapi kembali ke masyarakatnya bagaimana cara tanggap masyarakat dengan adanya upaya-upaya yang sudah dilakukan pihak pemerintah desa dalam memberdayakan. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa hal tersebut berdampak positif dan bagi sebagian masyarakat lain yang beranggapan bahwa upaya yang dilakukan dalam memberdayakan itu dianggap tidak penting.

Dari jawaban narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan kepemimpinan Kepala Desa melalui pembentukan program pembinaan kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan, maka sebagian masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut sudah bisa mengembangkan skill mereka. Dalam menjalankan program kegiatan tersebut, Kepala Desa melibatkan bawahan dalam bekerja.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data diatas, maka dalam pembahasan sub bab ini terdapat kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Desa Pegajahan sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan :

4.3.1 Adanya Kerjasama Dengan Bawahannya

Menurut Robbins dan Coulter dalam Tambunan (2015:54) pemimpin bergaya demokratis menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja dan menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa kepemimpinan demokratis efektif apabila adanya kerjasama pemimpin dengan bawahan. Kerjasama yang efektif dapat dilihat dari dalam menjalankan tugas ada terdapat koordinasi antara pemimpin dan bawahan, efektif apabila kerjasama yang dilaksanakan dijalankan dengan masyarakat juga tidak hanya dengan perangkat desa/bawahan. Kerjasama dengan bawahan yang dimaksud adalah Kepala Desa dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan cenderung melibatkan bawahan, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja guna mendapatkan umpan balik untuk melatih bawahan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kerjasama yang dilakukan Kepala Desa Pegajahan dengan bawahan belum maksimal, karena kerjasama yang dilakukan

Kepala Desa Pegajahan hanya melibatkan dan menunjuk perangkat desa/bawahan yang bidangnya terkait dalam memberdayakan masyarakat. Kepala Desa Pegajahan tidak turun langsung ke lapangan dalam melakukan kerjasama tersebut. Padahal menurut teori, kepemimpinan yang demokratis seharusnya dalam bekerjasama harus mendorong partisipasi bawahan maupun masyarakat secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 Februari 2020 dengan bapak Mhd.Yamin, bahwa Kerjasama yang dilakukan Kepala Desa Pegajahan hanya dengan bawahan tidak dengan masyarakat. Kerjasama tersebut terhalang oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat sehingga Kepala Desa susah untuk melakukan interaksi langsung. Dengan hal itu, kerjasama yang dilakukan Kepala Desa Pegajahan hanya melibatkan bawahan guna untuk tercapainya tujuan dengan di adakannya kerjasama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerjasama/terlibat langsung secara bersama-sama dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan.

4.3.2 Adanya Ciri Kepemimpinan Demokratis Yang Selalu Berusaha Mensinkronisasikan Kepentingan dan Tujuan Organisasi Dengan Kepentingan dan Tujuan Pribadi Dari Para Bawahannya

Menurut Winardi (2000:78) kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Dengan kata lain, setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat

diberikannya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Selain itu dapat diketahui bagaimana melaksanakannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa seorang pemimpin/Kepala Desa dalam mewujudkan kepentingan dan tujuan para bawahan berjalan secara efektif dan terarah apabila Kepala Desa mampu mensinkronisasikan antara kepentingan dan tujuan untuk pribadinya dan untuk bawahan. Kepentingan dan tujuan yang dimaksud adalah Kepala Desa Pegajahan memenuhi dan mewujudkan kebutuhan guna memberdayakan masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 Februari 2020 dengan bapak Mhd.Yamin selaku Kepala Desa Pegajahan, bahwa dalam mewujudkan kepentingan masyarakat harus didampingi dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu sedniri. Hal tersebut menunjukkan, bahwa Kepala Desa Pegajahan dalam mensinkronisasikan dan mewujudkan kepentingan dan kebutuhan guna untuk memberdayakan masyarakat masih belum berjalan dengan maksimal, meskipun Kepala Desa Pegajahan tidak selalu mewujudkan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Dengan pencapaian tujuan yang belum maksimal, dapat dilihat dari sebagian masyarakat Desa Pegajahan yang belum mengetahui secara pasti sumbangan/kebutuhan yang dapat diberikan oleh Kepala Desa dan masih kurangnya sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi atas kegiatan pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan hal ini, dapat dilihat bahwa Kepala Desa Pegajahan belum mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan secara tertib. Padahal menurut teori, kepemimpinan yang demokratis dalam melaksanakan kegiatan

memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat berdaya seharusnya dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.

4.3.3 Adanya Tanggung Jawab Yang Dimiliki Oleh Pemimpin Dalam Memberdayakan Masyarakat

Menurut Winardi (2000:78) kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Dengan kata lain, setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat diberikannya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Selain itu dapat diketahui bagaimana melaksanakannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa kepemimpinan yang demokratis dalam menjalankan tugasnya berjalan secara efektif dan efisien apabila tanggung jawabnya jelas dan terarah. Tanggung jawab yang dimaksud adalah Kepala Desa dalam Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 Februari 2020 dengan bapak Mhd.Yamin selaku Kepala Desa Pegajahan, tanggung jawab seorang Kepala Desa yaitu memimpin masyarakat. Bertanggung jawab mengatasi segala permasalahan yang terdapat di Desa maupun dari masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan segala kegiatan, harus

ada peran dan partisipasi dari bawahan serta masyarakat. Kepala Desa selalu melibatkan bawahan dalam melaksanakan kegiatan. Dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa melibatkan bawahan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan secara formal dan non-formal. Berdasarkan asumsi teori tersebut, bahwa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tujuan belum terlaksana sepenuhnya dengan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan, dalam menjalankan program pembinaan untuk memberdayakan masyarakat Kepala Desa Pegajahan belum sepenuhnya turun langsung berinteraksi menghadapi masyarakat setempat untuk memberikan pembinaan. Kepala Desa Pegajahan selalu melibatkan bawahan, padahal menurut teori pemimpin yang demokratis harus mampu membuat masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan Kepala Desa.

4.2.4 Adanya Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Melalui Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut Papilaya (2001:1) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan serta upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa pemberdayaan masyarakat teratasi dan memiliki perubahan yang lebih baik apabila dilakukan dengan kepemimpinan Kepala Desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah masyarakat diberikan pembinaan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat semakin berdaya, mandiri, partisipatif dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Dan dengan membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 06 Februari 2020 dengan bapak Mhd.Yamin selaku Kepala Desa Pegajahan, sebagai pemimpin yang dalam menjalankan kepemimpinannya secara demokratis dalam mengambil keputusan selalu dengan musyawarah. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memberikan pelatihan kecantikan (salon) kepada pemudi yang putus sekolah dan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemuda masyarakat Desa Pegajahan untuk mencegah penggunaan NARKOBA. Berdasarkan asumsi teori tersebut, bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan kepemimpinan Kepala Desa sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program pembinaan yang dibentuk Kepala Desa dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat yang dalam menjalankan kegiatan tersebut Kepala Desa melibatkan bawahan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kapasitas kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai sudah dilaksanakan cukup baik, akan tetapi belum maksimal. Kapasitas yang dilakukan yaitu dengan adanya kerjasama antara pemimpin dengan bawahan/perangkat desa sudah bekerjasama terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Kepala Desa yang sudah menunjuk langsung perangkat desa yang bidangnya terkait dalam memberdayakan masyarakat, dan bawahan sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang sudah ditetapkan. Dalam memberdayakan masyarakat, Kepala Desa melibatkan bawahan untuk menjalankan segala kegiatan mengenai pemberdayaan seperti pembinaan yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan secara formal dan non-formal. Kemudian, dalam menjalankan kepemimpinan yang demokratis Kepala Desa Pegajahan mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Dengan kepemimpinannya yang demokratis, Kepala Desa Pegajahan sebagai pemimpin memiliki Tujuan yang akan dicapai yaitu memberdayakan masyarakat Desa Pegajahan. Agar tujuan tercapai, maka Kepala Desa Pegajahan berupaya untuk mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan kehidupannya. Dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan, sebagian masyarakat Desa Pegajahan yang masih belum merasakan adanya kebutuhan yang telah diakomodir oleh Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Kemudian, dengan kepemimpinan demokratis Kepala Desa Pegajahan mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin dalam memberdayakan masyarakat. Bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin yang demokratis tanggung jawab yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam menjalankan program pembinaan untuk memberdayakan masyarakat Kepala Desa Pegajahan belum sepenuhnya turun langsung menghadapi masyarakat untuk memberikan pembinaan. Kepala Desa selalu melibatkan para bawahannya, sehingga masyarakat Desa Pegajahan beranggapan bahwa tidak ada tanggung jawab yang maksimal sebagai pemimpin di Desa dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Dan dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kepemimpinan Kepala Desa dengan pembentukan program pembinaan kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memberikan pelatihan kecantikan (salon) kepada pemudi yang putus sekolah dan memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada pemuda masyarakat Desa Pegajahan untuk mencegah penggunaan NARKOBA. Sebagian masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut sudah bisa mengembangkan skill mereka. Dalam menjalankan program kegiatan tersebut, Kepala Desa melibatkan bawahan dalam bekerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data mengenai Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai, maka keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa secara garis besar dapat dikatakan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa kategorisasi yang belum terlaksanakan dengan baik :

1. Kerjasama yang dijalankan oleh Kepala Desa dengan bawahannya dalam memberdayakan masyarakat hasilnya belum maksimal. Karena, kerjasama yang dijalankan hanya melibatkan kepada bawahan saja. Tidak ada kerjasama dengan masyarakat.
2. Kepala Desa belum mampu mewujudkan dan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang kehidupannya perlu untuk diberdayakan. Karena, masih kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat.
3. Tanggung jawab Kepala Desa Pegajahan Serdang Bedagai dalam memberdayakan masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Karena, program pembinaan yang sudah dibuat tidak secara langsung Kepala Desa yang menjalankan.

4. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kepemimpinan Kepala Desa Pegajahan Serdang Bedagai sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat Desa Pegajahan terkhusus pemuda yang putus sekolah sudah dapat mengembangkan skill yang dimiliki dengan mengikuti pelatihan yang sudah diadakan oleh tim yang sudah dibentuk.

Berdasarkan hasil dari setiap kategorisasi yang sudah ada hasil temuannya, maka dapat diketahui bahwa Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai belum maksimal. Hal ini dapat dilihat, dengan kepemimpinannya yang demokratis Kepala Desa belum mampu mengajak semua masyarakat Desa Pegajahan untuk berpartisipasi ikut serta dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan. Sehingga, dengan adanya kepemimpinan yang demokratis masih banyak masyarakat yang kehidupannya belum berdaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Kapasitas Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pegajahan Serdang Bedagai. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pegajahan Serdang Bedagai dalam memberdayakan masyarakat harus lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan bawahan, harus menjalankan kerjasama dengan masyarakat juga guna untuk melihat keberhasilan seorang

Kepala Desa bahwa dalam menjalankan kepemimpinan yang demokratis benar sudah dilaksanakan dan ada hasil.

2. Kepala Desa Pegajahan Serdang Bedagai dalam mewujudkan tujuannya untuk memberdayakan masyarakat, Kepala Desa harus lebih peduli dan memperhatikan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat Desa Pegajahan, Kepala Desa harus mampu mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi.
3. Kepala Desa Pegajahan Serdang Bedagai harus lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan program pembinaan untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai pemimpin yang demokratis harus dijalankan dengan baik tanggung jawabnya agar tercapai tujuan.
4. Sebagai pemimpin Kepala Desa harus lebih meningkatkan peranannya sebagai pemimpin di Desa dalam memberdayakan masyarakat, agar masyarakat mendapatkan dampak yang positif dengan adanya pemberdayaan yang dilaksanakan Kepala Desa sebagai pemimpin yang demokratis.

Daftar Pustaka

- Hakim, Rusman. 2001. *Cermin kepemimpinan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ife, Jim. 1995. *Pengembangan Komunitas: Menciptakan Analisis dan Praktik Visi Alternatif Masyarakat*. Australia: Longman
- Moelong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, wilayah, dan pembangunan* : UNPAD Press
- Mustakim, Zaini. Mochammad. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Papilaya, Eddy Ch. 2001. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Sr-Ruzz Madia
- Rivai, veithzal. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 1998. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : CV HAJI MASAGUNG
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan masyarakat* : PUSTAKA PELAJAR
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tambunan, Toman. 2015. *Pemimpin dan kepemimpinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sumber Lain

Abdul Rahim, 2018. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kebumen Dan Desa Teluk Lencah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau*, Vol.5, Hlm.4-5.

Galih Aisia, 2015. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo*. Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Gerald Hard Lantemona, dkk. 2017. *Fungsi Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.1, Hlm. 5-6.

Nur Aula Safitri, 2019. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik*. Gresik: FIS UNESA.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pemberdayaan-masyarakat-desa>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Chintia Pramai Shella
Tempat/Tanggal Lahir : Pegajahan, 26 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Karang Sari Desa Pegajahan Kec. Pegajahan
Anak Ke : Satu (1) dari 2 bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suroto
Nama Ibu : Siti Suliasani

Pendidikan

1. Tahun 2010 Lulus SD Negeri 106187 Pegajahan
2. Tahun 2013 Lulus SMP Negeri 3 Pegajahan
3. Tahun 2016 Lulus SMA Negeri 1 Pegajahan

Medan, Maret 2020

Chintia Pramai Shella